

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Pendekatan Penelitian

##### 1.1.1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang tujuannya untuk melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada atau untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi (Masri Singarimbun, 1989). Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik-karakteristik keahlian Pemeriksa Pajak.
- b. Penelitian ini menggunakan uji nonparametrik. Menurut Murtanto (1999), ada tiga alasan mengapa digunakan uji nonparametrik:
  1. Perhitungan yang diperlukan sederhana dan dapat dikerjakan dengan cepat.
  2. Datanya tidak harus pengukuran kuantitatif, tetapi dapat juga berupa respons kualitatif atau nilai-nilai dalam skala ordinal dan memberi peringkat untuk dianalisis.
  3. Uji nonparametrik (dalam penelitian ini menggunakan Uji Kruskal-Wallis) disertai dengan asumsi-asumsi yang jauh tidak mengikat dibandingkan uji parametrik padanannya.

##### 1.1.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Yang dimaksud dengan kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai masalah yang diteliti. Tujuan dilakukannya kuesioner ini adalah

untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai suatu masalah secara serentak. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sifatnya tertutup. Kuesioner ini merupakan angket langsung dengan jenis penyusunan item pilihan berganda dan pengisian tabel. Kuesioner yang dikirimkan terdiri atas 2 bagian.

- a. Bagian yang pertama terdiri atas 12 butir pertanyaan pilihan yang sifatnya merupakan pertanyaan tertutup. Tujuan digunakannya pertanyaan tertutup ini agar jawaban yang diberikan responden dapat lebih terfokus kepada permasalahan yang diteliti sehingga memperkecil kemungkinan adanya jawaban yang menyimpang.
- b. Bagian yang kedua terdiri atas tiga buah tabel. Pada Tabel I, responden diminta untuk memberikan bobot terhadap 35 karakteristik keahlian. Bobot yang diberikan adalah 1 untuk karakteristik yang kurang penting dan 5 untuk karakteristik yang sangat-sangat penting. Pada Tabel II, responden diminta untuk mengelompokkan 35 buah karakteristik keahlian yang ada kedalam 6 rerangka keahlian yang ada yaitu PE, SPK, KP, CP, AT, KB. Sedangkan pada tabel III, responden diminta untuk memberikan bobot terhadap 6 rerangka karakteristik yang diteliti. Bobot yang diberikan sama seperti bobot yang diberikan pada tabel I.

Setelah kuesioner selesai dirancang, kemudian dikirim kepada responden melalui pos tercatat dengan disertai prangko balasan. Jawaban kuesioner dikirimkan melalui pos oleh responden atau diambil sendiri oleh peneliti. Contoh kuisisioner ini disajikan pada lampiran.

### **1.1.3. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah Direktorat Jenderal Pajak sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Survei sampel adalah prosedur dimana hanya sebagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat dan ciri yang dikehendaki dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan cara tertentu sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili populasi (representatif).

Bila data dianalisis secara statistik parametrik, maka jumlah sampel harus besar (lebih dari 30 sampel) karena nilai-nilai atau skor yang diperoleh distribusinya harus normal. Dengan analisis statistik non-parametrik, maka tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sehingga tidak memerlukan sampel besar atau kurang dari 30 sampel (Anto Dajan, 1996). Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, penulis merasa cukup untuk menggunakan 15 sampel untuk masing-masing responden (jenjang auditor senior/junior dan manajer/partner)

Sampel dipilih sehingga setiap satuan elemen atau unsur mempunyai peluang untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi (ketepatan) dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh.
3. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya seminimal mungkin.

Untuk pengambilan sampel terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pengambilan sampel secara acak (*random sampling*)

2. Pengambilan sampel secara tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu (*purposive sampling*).

Dalam menentukan metode pengambilan sampel, harus dipertimbangkan hubungan antara biaya, tenaga, dan waktu di satu pihak, serta besarnya presisi di pihak lain.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian ini dan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Keterbatasan dana, waktu dan tenaga.
2. Penekanan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik keahlian pemeriksa pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini tidak memerlukan jumlah sampel yang besar. Pengambilan sampel juga tidak memerlukan aturan-aturan tertentu untuk mendapatkan sampel penelitian ini. Akan tetapi jumlah sampel yang ditargetkan harus didapatkan. Bila jumlah sampel yang ditargetkan telah berhasil didapatkan, maka dapat dilakukan pembahasan terhadap data yang ada.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak.

## 1.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data yaitu:

1. Analisis Kualitatif: yaitu serangkaian kegiatan analisis data dalam objek penelitian yang tidak diwujudkan dalam angka.
2. Analisis Kuantitatif: yaitu serangkaian kegiatan analisis data dalam bentuk angka-angka dengan cara mengklasifikasikan, melakukan perhitungan, membandingkan, dan mengaplikasikan dalam bentuk angka.

Setelah kuesioner dikembalikan, dilakukan tabulasi data terhadap seluruh jawaban kuesioner dengan menghitung dan menggolongkan jawaban (hasil tabulasi tersaji pada lampiran). Setelah ditabulasi selanjutnya data akan diolah dalam lima tahap analisis yaitu:

### **1. Analisis Profil Responden**

Profile responden dianalisis dari hasil tabulasi yang dilakukan (hasil tabulasi tersaji pada lampiran). Profile responden ini terdiri dari enam buah pertanyaan yang bertujuan untuk menjelaskan jumlah responden dan tingkat pendidikan, pengalaman kerja responden, dan deskripsi terhadap keahlian auditor. Profile responden ini akan membantu menginterpretasikan hasil penelitian secara baik dan proporsional dengan mempertimbangkan latar belakang dan jawaban yang diberikan oleh responden.

### **2. Persepsi Terhadap Keahlian**

Tahap ini akan mencoba membahas enam buah pertanyaan yang mengulas hal-hal yang berkaitan dengan keahlian pemeriksa pajak seperti upaya untuk meningkatkan keahlian auditor, faktor yang mempengaruhi keahlian pemeriksa pajak dan hal lainnya.

### **3. Penilaian Terhadap Data Yang Dikumpulkan**

Tahap ini dilakukan dengan menjelaskan, menterjemahkan, dan mengurutkan serta memberi peringkat dari data yang terkumpul. Selanjutnya Karakteristik keahlian tersebut akan dikelompokkan dalam rerangka keahlian sesuai dengan pilihan terbanyak dari responden. Variabel-variabel yang akan diukur pada tahap ini didasarkan tingkat kepentingan atau urgensi dari responden tentang variabel karakteristik keahlian yang

bersangkutan. Adapun skala tingkat kepentingan tersebut terdiri dari :

1. Kurang Penting (skala 1)
2. Sangat-sangat Penting (skala 5)

Untuk masing-masing skala diatas, ditentukan point berturut-turut: Point satu untuk persepsi kurang penting dan point lima untuk skala sangat-sangat penting, kemudian akan dihitung nilai dari skala diatas.

#### 4. Analisis Untuk Menemukan Variabel Baru

Setelah data dijelaskan dan diurutkan pada tahap analisis yang pertama, kedua dan ketiga, selanjutnya data akan dianalisis untuk menemukan variabel besar (hipotek) dalam jumlah yang lebih kecil yang melandasi atau dapat mewakili seperangkat variabel nyata dalam jumlah yang lebih besar tanpa merusak arti perangkat variabel nyata tersebut. Sesuai dengan tujuan tersebut maka alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis faktor. Asumsi dasar dari Analisis Faktor adalah bahwa setiap variabel semula itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum dan khusus. Model dasar untuk Analisis Faktor adalah :

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \dots \\ X_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{pi} & b_{p2} & \dots & bpm \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \dots \\ e_p \end{pmatrix}$$

atau dengan notasi singkat untuk matriks  $X = b f + e$

Elemen-elemen baris ke-i dari matriks b disebut beban-beban faktor untuk variabel asal  $X_i$ .

Analisis Faktor dilakukan dalam beberapa tahap pengolahan antara lain:

- a. Menentukan matriks korelasi (*corelation matriks*)

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh koefisien korelasi antar pasang variabel nyata karakteristik keahlian sehingga dapat disusun matriks korelasinya.

b. Mencari nilai determinan matrik korelasi ( I M I )

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi sifat interdependent (memiliki keeratan satu sama lain) pada setiap karakteristik keahlian.

c. “*Principal Component Analysis*”

*Principal Component Analysis* bertujuan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan perangkat variabel baru dengan ketentuan bahwa antar variabel baru tersebut tidak terdapat korelasi (ortogonal).

d. Statistik awal (*Initial Statistic*)

Tahap ini bertujuan untuk menghitung nilai *Eigen Value* yang dimiliki oleh setiap karakteristik keahlian yang diteliti. Untuk menunjukkan jumlah keragaman yang diberikan oleh setiap faktor (karakteristik keahlian) atau banyaknya satu karakteristik mengabsorpsi karakteristik lainnya.

e. Rotasi Faktor

Rotasi faktor ini dilakukan untuk memaksimumkan keragaman atau komunalitas yang terserap pada tiap faktor sehingga mudah untuk dipelajari. Rotasi faktor ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan deskripsi struktur yang mendasari data. Rotasi faktor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis rotasi ortogonal yaitu rotasi yang bersifat bahwa setelah rotasi, sumbu-sumbu koordinat dalam kedudukannya yang baru tetap ortogonal atau saling tegak lurus. Dari matriks rotasi faktor *Varimax* dapat dilihat faktor karakteristik keahlian yang baru beserta dengan masing-masing karakteristik yang diserap atau diekstrak didalamnya.

f. Penentuan urutan faktor berdasarkan jumlah indeks.

Setelah dilakukan rotasi faktor, selanjutnya akan dihitung besarnya jumlah indeks dari setiap faktor untuk menentukan urutan faktor-faktor yang baru. Indeks faktor akan dihitung berdasarkan bobot yang diberikan oleh 38 responden.

## 5. Analisis Untuk Mengetahui Perbedaan Persepsi Antara Tiga Kelompok Responden

Setelah data dianalisis dengan menggunakan analisis faktor, selanjutnya akan diteliti apakah ada perbedaan persepsi yang nyata diantara tiga kelompok responden. Sesuai dengan tujuan ini, maka alat analisis yang digunakan adalah Uji Kruskal–Wallis. Uji Kruskal–Wallis merupakan generalisasi uji dua contoh untuk  $k > 2$ . Uji Kruskal Wallis ini digunakan untuk menguji hipotesis nol  $H_0$  bahwa  $k$  contoh bebas itu berasal dari populasi yang identik. Untuk menguji hipotesis nol  $H_0$  bahwa  $k$  contoh berasal dari populasi yang identik, maka akan dihitung:

$$h = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{i=1}^k \frac{r_i^2}{n_i} - 3(n+1)$$

Bila  $h$  jatuh dalam titik wilayah kritik  $h > \chi^2_{\alpha}$  dengan  $v = k - 1$  derajat bebas, maka  $H_0$  ditolak pada taraf nyata  $\alpha$ , sedangkan apabila  $h$  jatuh diluar wilayah kritik, maka  $H_0$  diterima.

### 1.3 Jenis Data

1. Data primer: adalah data yang diperoleh secara langsung dari jawaban kuisioner yang telah disebarakan kepada responden.
2. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dalam bentuk hasil analisis, dimana data ini lebih banyak sebagai data pembantu dan sumbernya lebih banyak diambil di luar kuisioner yang disebarakan. Misalnya seperti hasil penelitian sebelumnya.



#### 1.4 Latar Belakang dan sejarah singkat Direktorat Jenderal Pajak

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :

- a. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
- b. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara dan saat ini sudah menjadi BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara dibawah Departemen Keuangan
- c. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
- d. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976,

Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menghimpun penerimaan pajak negara secara optimal Misi Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyadari bahwa penerimaan pajak negara yang optimal dapat terpenuhi apabila :

1. Tercapai tingkat kepuasan yang tinggi dari Wajib Pajak atas Pelayanan Perpajakan serta,
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak Melakukan dua fungsi organisasi yaitu :

#### 1. Fungsi pelayanan perpajakan

Fungsi pelayanan perpajakan dijalankan dengan melakukan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
- b. Meningkatkan efektifitas penyuluhan
- c. Meningkatkan efektifitas kehumasan

#### 2. Fungsi pengawasan dan penegakan hukum

Fungsi pengawasan dan penegakan hukum dijalankan dengan melakukan :

- a. Mengefektifkan pengawasan WP non filler

- b. Meningkatkan kepatuhan WP melalui pembetulan SPT
  - c. Mengoptimalkan pelaksanaan ekstensifikasi
  - d. Mengoptimalkan pelaksanaan penagihan
  - e. Meningkatkan kegiatan intelijen perpajakan
  - f. Meningkatkan efektifitas pemeriksaan
  - g. Meningkatkan efektifitas penyidikan
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :







#### 4. Fungsional Pemeriksa Pajak

Fungsional Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tugasnya dalam satu kelompok pemeriksa pajak. Pada satu kelompok pemeriksa pajak terdiri atas :

a. Supervisor atau ketua kelompok

Melaksanakan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana penekanan tugas lebih kepada melakukan telaah atas kertas kerja serta Laporan Pemeriksaan Pajak

b. Ketua Tim

Melaksanakan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penekanan tugas lebih kepada program pemeriksaan yang dilakukan.

c. Anggota Tim

Melaksanakan pencarian dan pengumpulan data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penekanan tugas lebih kepada pelaksanaan pengumpulan data, serta pembuatas kertas kerja dan Laporan Pemeriksaan Pajak.

Saat ini Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tersebar di 30 Kantor Wilayah setingkat eselon II, 2 Direktorat yaitu Direktorat Pemeriksaan Penagihan Pajak serta Direktorat Intelijen dan Penyidikan serta 331 Kantor Pelayanan Pajak Pratama diseluruh Indonesia.

Sedangkan jumlah pemeriksa pajak berdasarkan Golongan Kepangkatan terdiri dari :

- a. Golongan II : 527 pemeriksa
- b. Golongan III a dan b : 1.462 pemeriksa
- c. Golongan III c dan d : 925 pemeriksa
- d. Golongan IV : 173 pemeriksa